**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1986.

Ateng Syarifudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Bina Cipta, Bandung, 1985.

Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokusmedia, Bandung, 2010.

Bewa Ragawino, *Desentralisasi Dalam Kerangka Otonomi Daerah di Indonesia*, Unpad, Bandung, 2003.

HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

........................, *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, Rajawali, Jakarta, 2003.

........................., *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Rafika Aditama Cet Ketujuh, Bandung, 2011.

I Gde Pantja Astawa, *Kriminalisasi Perbuatan Hukum Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, FH Unpad, Bandung, 2006.

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011.

Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah: Perspektif Teori Otonomi dan Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*, Setara Press, Malang, 2012.

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986.

Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bernbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*, Setara, Malang, 2012.

Ni’matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009.

Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Cetakan Keenam, Rafika Aditama, Bandung, 2010.

Pamudji, *Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Pheni Chalid, *Otonomi Daerah Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik*, Kemitraan, Jakarta, 2005.

Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Sadu Wasistiono, *Dilema Upaya Efisiensi Birokrasi Daerah*, CLGI, Jatinangor, 2003.

Sayuti Una, *Pergeseran Kekuasaan Pemerintahan Daerah Menurut Konstitusi Indonesia Kajian Tentang Distribusi Kekuasaan Antara DPRD Dan Kepala Daerah Pasca Kembali Berlakunya UUD’45*, UI Press, Yogyakarta, 2004.

Setyo Pamungkas, *Investasi di Era Otonomi Daerah*, MIH UKSW, 2010.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Soetardjo Kartohadikusumo, *Pelaksanaan Otonomi Desa*, Alumni, Bandung, 1984.

Soetidjo, “*Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah,* Rineka Cipta, Jakarta 1990.

Sudono Syueb, *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah: Sejak Kemerdekaan sampai Era Reformasi*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.

Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Rafika Aditama, Bandung, 2005.

Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembagunan Indonesia,* BPHN, Jakarta, 1999.

Supriadi, *Desa Kita,* Alumni, Bandung, 1984.

Susantyo, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Rafika Aditama, Bandung, 2008.

Sri Woelan Aziz, *Aspek-aspek Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia,* Citra Media, Surabaya, 1996.

Syaukani, *Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah,* Gerbang Dayaku, Kaltim, 2001.

Tri Ratnawati, *Desentralisasi dan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, dalam Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah: Perspektif Hubungan Internasional,* BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 2000.

Urakame Udak, *Pembaharuan Tata Pemerintahan Desa*, Sanlima-the Ford Foundition, Jakarta, 2003.

Yando Zakaria, *Desa Merebut Negara, Beberapa Catatan Reflektif tentang Upaya-upaya Pengakuan, Pengambilan, dan Pemulihan Otonomi Desa*, Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria (KARSA), Yogyakarta, 2004.

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kerjasama Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

1. **Sumber Lain**

Achmad Nurmandi, *Otonomi Desa di Indonesia: Otonomi Asli atau Tidak Lagi*, [www.lppm.uns.ac.id](http://www.lppm.uns.ac.id), diakses, 25 Mei 2012, 16:45 WIB.

Akil Mochtar, *Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan Daerah di Era Otonom*, diakses dalam situs: http://[www.google.com](http://www.google.com)/kewenangan\_pusat\_dan\_daerah\_dalam.html., pada tanggal 26 Mei 2012, 19:30 WIB.

Alamasdi Syahza, *Percepatan Peningkatan Ekonomi Perdesaan Melalui Pengembangan Koperasi Berbasis Agribisnis di Daerah Perdesaan*, Lembaga Peneliti Universitas Riau, [www.alamsdi.unri.ac.id](http://www.alamsdi.unri.ac.id), 27 Mei 2012, 13:23 WIB.

Antonius Tarigan, *Kerjasama Antar Daerah (KAD) Untuk Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Daya Saing Wilayah*, Direktorat Otonomi Daerah Bappenas, 30 April 2010.

Asep Warlan Yusuf, *Hukum Administrasi Negara*, Silabus HAN FH Unpar, Bandung, September 2006.

Badan Pusat Statistik, *Eksisistensi Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pembangunan Ekonomi Perdesaan*, [http://www.endonesia.com](http://www.endonesia.com/mod.php?=publisher&op=viewarticle&cid=5&artid=1424), posting: 19 Maret 2009, diakses 27 Mei 2012, 11:30 WIB.

Bagir Manan, *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan*, Makalah, disampaikan pada Penataran Dosen Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum BKS-PTN Bidang Hukum Se-Wilayah Barat, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, tanggal 11 November 1994.

Bambang Yudoyono, *Makalah Telaah Kritis Implementasi UU No. 22/1999: Upaya Mencegah Disintegrasi Bangsa***,** disampaikan pada Seminar dalam rangka Kongres ISMAHI, Bengkulu, 22 Mei 2000.

Bernadinus Steni, *Desentralisasi, Koordinasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Pasca Otonomi Daerah*, [www.huma.or.id](http://www.huma.or.id), 2004, diakses: 28 Mei 2012, 21:22 WIB.

Departemen Dalam Negeri, *Petunjuk Teknis Operasional PMPN Mandiri Perdesaan*, [www.pnpm-perdesaan.or.id](http://www.pnpm-perdesaan.or.id), Jakarta 5 November 2008, hlm. 6. diakses: 30 Mei 2012, 20:18 WIB.

Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, *Naskah Akademik RUU Desa*, [www.forumdesa.org](http://www.forumdesa.org), Jakarta, 2007.

Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, *PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan*, [www.forumdesa.org](http://www.forumdesa.org), Jakarta, 29 Januari 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), FE Unbraw, 2007.

Hariyanto, *Contoh Proposal Badan Kerjasama Desa*, [http://hariyantoedcis.blogspot.com](http://hariyantoedcis.blogspot.com/), posting: Selasa, 30 Desember 2008, diakses pada 1 Pebruari 2012, 08:43 WIB.

Inspire, *Memberdayakan Desa*, [www.inspire-web.or.id](http://www.inspire-web.or.id), diakses: 26 Mei 2012, 21:14 WIB.

Lendi Wibowo, *Perspektif Transformasi Kelembagaan Kerjasama Antar Desa*, [www.pnpm-perdesaan.or.id](http://www.pnpm-perdesaan.or.id), diakses: 27 Mei 2012, 13:17 WIB.

Masyunani, *Perspektif Pengelolaan Keuangan dan Ekonomi Desa*, [www.forumdesa.org](http://www.forumdesa.org), Makalah yang disampaikan pada Forum Desa, Malang, 4 Juli 2006, diakses: 27 Mei 2012, 13:56 WIB.

Pardjoko, *Filosofi Otonomi Daerah Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Nomor 25 Tahun 1999*, Makalah Falsafah Sains (PPs 702), Program Pasca Sarjana/S3, Institut Pertanian Bogor, February 2002.

Rahayu Prasetianingsih dan Inna Junaenah, *Menakar Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Otonomi Daerah di Indonesia*, [http://www.fh.unpad.ac.id](http://www.fh.unpad.ac.id/), 2008, diakses: 10 Pebruari 2012, 16:18 WIB.

Sutoro Eko, *Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa*, Institute for Research and Empowerment (IRE), Yogyakarta, Pebruari 2008.

.................., *Mempertegas Posisi Politik dan Kewenangan Desa*, [www.forumdesa.org](http://www.forumdesa.org), Makalah yang disampaikan pada Forum Desa, 21 Desember 2008, diakses: 27 Mei 2012, 14:00 WIB.

Syamsul Bachri, *Otonomi Daerah Dalam Prospektif Struktur dan Fungsi Struktur dan Fungsi Birokrasi Daerah,* Makalah yang disajikan dalam Seminar Nasional Otda Dalam Prospektif Indonesia Baru, Makassar, 1999.